

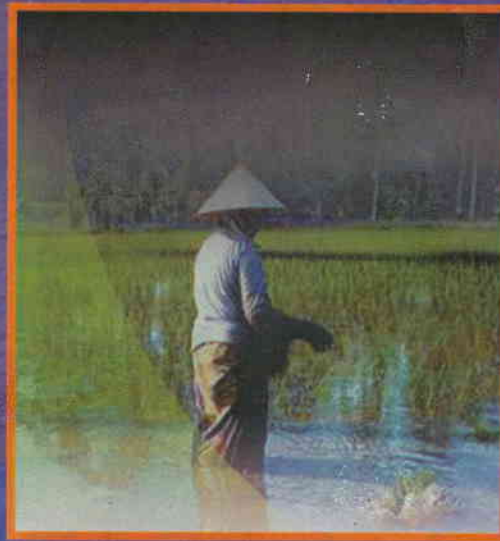
ISBN: 978-979-17638-3-7



**PROSIDING
SEMINAR DAN
TEMU ILMIAH NASIONAL**

**Revitalisasi Pertanian
dalam
Menghadapi Krisis
Ekonomi Global**

Surakarta, 21 Maret 2009



Penyusun :

Dr. Ir. Mohd. Harisuddin, M.Si
Ir. Vita Ratri C, M.P., M.Agr., Ph.D
Dr. Ir. Kusnandar, M.Si
Dr. Ir. Suwanto, M.Si
Ir. Supyani, M.P., M.Sc., Ph.D

Diterbitkan Oleh :

**Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

KOMISI C

- DIVERSIFIKASI USAHATANI BERBASIS PADI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN PENDAPATAN PETANI DI LAHAN RAWA LEBAK**
R. Smith Simatupang, dan Nurita 185
- UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN USAHATANI UBI JALAR MELALUI PERBAIKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA**
Sularno dan Abdul Choliq 197
- BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA YANG ADAPTIF DAN PROSPEKTIF DALAM MENUNJANG AGRIBISNIS DI LAHAN PASIR PANTAI**
Dody Kastono 203
- AGROINDUSTRI BERBASIS KOMUNITAS: PENDEKATAN SOSIOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL**
Eko Murdiyanto 210
- DAMPAK KENAIKAN HARGA KEDELAI TERHADAP EFISIENSI DAN UPAYA MEMPERTAHKAN USAHA PADA HOME INDUSTRY TAHU DI KABUPATEN SUKOHARJO**
Erlyna Wida R dan Umi Barokah 221
- PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI TAPIOKA ALTERNATIF MENGHADAPI KRISIS PEREKONOMIAN GLOBAL**
Antik Suprihanti (asuprihanti@yahoo.com) 233
- ANALISIS USAHA PENGEMUKAN SAPI BALI DENGAN INTRODUKSI PROBIOTIK DI DESA MARGA TABANAN**
Anastasia Sischa jati Utami, Adimas Galih Warasa Putra 245
- PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI SKALA KECIL MELALUI JARINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL**
Oleh: Kusnandar 252
- ANALISIS PENDAPATAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PHBM**
Prasodjo Hari Nugroho 260
- PEMANFAATAN POTENSI DAERAH SEBAGAI BASIS PERENCANAAN PENERAPAN PERTANIAN TERPADU (INTEGRATED FARMING)**
Danang Ernawan, Didik Wahyu Prasetyo, Fitri Sertia Mayanti, Isnaeni Mei F, Ikhean Nugroho 269

KOMISI D

- PROSPEK PENGEMBANGAN AGROFORESTRI SEBAGAI LUMBUNG BIOENERGI**
Sugiyarto 275
- PERUBAHAN KANDUNGAN SENYAWA DAN SIFAT FISIK UBI JALAR (*Ipomoea batatas*) PADA BERBAGAI MACAM MEDIA DAN LAMA PENYIMPANAN**
Rosanna Christiningsih 283
- ANALISIS JUMLAH OPTIMAL TANAMAN JARAK PAGAR SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONSUMSI MINYAK TANAH : STUDI DI KABUPATEN BLORA**
Samanhudi 292
- ANALISIS KEUNGGULAN KOMPETITIF KOMODITAS PERTANIAN DI LAHAN LEBAK KALIMANTAN SELATAN**
Yanti Rina D dan Noorinayuwati 300
- PEMBANGUNAN SUMBERDAYA PERTANIAN DENGAN ORIENTASI PARTISIPASI, PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Budi Widayanto 313
- INTRODUKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN UBI JALAR UNGU MENJADI BERBAGAI PRODUK OLAHAN PANGAN DI KABUPATEN GIANYAR, BALI**
Dian Adi A. Elisabeth1) dan Indrie Ambarsari2) 320
- KARAKTERISASI BERAS VARIETAS CIHERANG DAN MEMBERAMO DAN PENDAYAGUNAANNYA SEBAGAI BAHAN BAKU KERUPUK PULI**
Jemmy1, Evan Gustin Oetomo, Nofa Adriani Tanoyo, Maria Matoetina Suprijono2 330
- DOMESTIKASI TUMBUHAN OBAT UNTUK MENGATASI EROSI PLASMANUTPAH AKIBAT KRISIS EKONOMI**
Bambang Pujiasmanto 340
- STUDI KUALITAS TANAH PADA BERBAGAI SISTEM PENGGUNAAN LAHAN UNTUK PROGRAM REVITALISASI PERTANIAN DI WILAYAH DESA NGADIPIRO KECAMATAN NGUNTORONADI, WONOGIRI**
Dwi Christine P.1), Purwanto2), Widyatmani Sih Dewi2) 349
- UPAYA UNTUK BERKELANJUTAN FUNGSI TANAH SEBAGAI KONSERVASI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DALAM PROGRAM REVITALISASI PERTANIAN** 353
- PERGESERAN ALAM DARI POTENSI SUMBER DAYA MENUJU KOMODITAS AKIBAT KRISIS EKONOMI GLOBAL**
Agung Wibowo 356
- DAFTAR PESERTA SEMINAR** 362

DAFTAR ISI

MAKALAH UTAMA

KRISIS FINANSIAL GLOBAL, REVITALISASI PERTANIAN DAN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
Rudi Wibowo

1

KRISIS EKONOMI GLOBAL DAN PELUANG PENGEMBANGAN BIOENERGI BAGI INDONESIA
Paulus Tjakrawan

5

KRISIS EKONOMI GLOBAL DAN KERAWANANAN KETAHANAN PANGAN
Endang Siti Rahayu

12

KOMISI A

DAYA HASIL 10 GENOTIPE PADI DILAHAN RAWA LEBAK TENGAHAN KALIMANTAN SELATAN
Izhar Khairullah dan Muhammad Saleh

21

EFFICIENCY OF P UPTAKE AND RICE YIELD (*Oryza sativa* L.) WITH
INORGANIC FERTILIZER, COW MANURE AND DIFFERENT BIODECOMPOSER
ON PADDY SOIL PALUR SUKOHARJO

J. Syamsiyah *, Mujiyo *, Hery Widiyanto* Sutarno**

27

PEMUPUKAN BERIMBANG PADA LAHAN SAWAH SEBAGAI UPAYA Mendukung REVITALISASI PERTANIAN
PADA ERA KRISIS GLOBAL

Ibnu Supriyanto¹, Widyatmani Sih Dewi², Mujiyo³

36

POTENSI KEDELAI SEBAGAI SUMBER PANGAN FUNGSIONAL
Heny Herawati

40

KAJIAN INOKULASI *Rhizobium* sp. DAN JARAK TANAM DENGAN POPULASI TETAP TERHADAP PERTUMBUHAN
GULMA PADA PERTANAMAN KEDELAI

Rahayu Widowati

49

PENGARUH PEMANGKASAN PUCUK DAN INOKULASI RIZOBIUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
HASIL TANAMAN KEDELAI

Sri Endah Prasetyowati S., MP.

64

MENGATASI KEHILANGAN HASIL AKIBAT PENYAKIT LAYU FUSARIUM PADA TANAMAN TOMAT
DENGAN AGEN PENGENDALI HAYATI *Gliocladium* Sp. ALTERNATIF MENGHADAPI
KRISIS EKONOMI GLOBAL

Sri Widadi

73

PENINGKATAN KERAGAMAN POHON PADA SISTEM AGROFORESTRI UNTUK MEWUJUDKAN
REVITALISASI PERTANIAN DI ERA KRISIS EKONOMI GLOBAL

Ahmad Ari Nugroho, Sistha Fitri Pramudita, Lady Noor Ayni, dan Joko Maryono

81

PENAMPILAN GENOTIPE PADI PADA KONDISI KEKERINGAN DI
LAHAN RAWA LEBAK DANGKAL KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Saleh, Izhar Khairullah dan Fatimah Azahra

87

KOMISI B

TEKNOLOGI PENGELOLAAN LAHAN SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
DALAM PENINGKATAN PRODUKSI SAYURAN DI LAHAN LEBAK

Suaidi Raihan

91

POTENSI USAHA TANI DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL PASCA REVITALISASI PERTANIAN
Mth. Sri Budiastuti

100

PERBAIKAN LAHAN TERDEGRADASI DENGAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK
DALAM Mendukung REVITALISASI PERTANIAN

Dyah Arbiwati

105

POTENSI PENGEMBANGAN *BIO CYCLO FARMING* SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN NGAWI

Umi Barokah dan Joko Sutrisno

114

REORIENTASI PERLUASAN AREAL PERTANIAN UNTUK MENGHADAPI KRISIS GLOBAL
(Studi Kasus : Lahan Gambut, Kalimantan Tengah)

Agus Supriyo dan Eni Maf'tuah

128

PENTINGNYA UJI KUALITAS TANAH SAWAH DALAM Mendukung REVITALISASI PERTANIAN
DI ERA KRISIS EKONOMI GLOBAL

Wahyu Adi Nugroho1), Widyatmani Sih Dewi2), Sudjono Utomo2)

142

POTENSI AZOLLA DALAM BIOREMEDIASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PERTANIAN DARI LOGAM BERAT
KADMIUM, KROM DAN TIMBAL

Sudadi

151

INTEGRASI GIS DAN REMOTE SENSING
UNTUK IDENTIFIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Mujiyo, SP., MP.

167

PEMBERDAYAAN PERAN DIVERSITAS BIOTA TANAH (BELOW-GROUND BIODIVERSITY)
DENGAN PENDEKATAN PROBIOTIK UNTUK KEBERLANJUTAN FUNGSI PRODUKSI DAN FUNGSI
EKOLOGI SUMBER DAYA TANAH

Widyatmani Sih Dewi

176

Agroindustri berbasis komunitas: Pendekatan sosiologis sebagai alternatif dalam menghadapi krisis ekonomi global

Agroindustry Based on Community: the Sociological Approach as the Alternative in global economic crisis

Eko Murdiyanto

Staf Pengajar Jurusan Agribisnis UPN “Veteran” Yogyakarta

Abstract

The global economic crisis that jumped at countries in the world caused poverty, especially in rural areas. To cultivate the strength in the sector of agriculture as the economic base of the government Country through the Department of Agriculture launched the agroindustry program that more headed in industrialisation in rural areas.

The development of agroindustry in rural areas more was aimed at the formation of the Sentra Agroindustri Region (KSA) that connected between the rural territory, sub-urban and urban areas. Considering in a sociological manner was gotten by the difference of the character between three region then was needed the fastener between the three of them in the form of “agroindustry community”.

The agroindustry community involved the role of the farmer, the government and private enterprise in one alliance. The form of the alliance that in involving the three components in having the acknowledgment of their respective existence was the strategic alliance complementary vertical. With this alliance was hoped the level of welfare of the farmer could as the core of the community increase together with the success of the development of agroindustry in rural areas.

Key words: Agroindustry, community, alliance

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi global yang terjadi telah menyebabkan kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Data terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 50 juta jiwa. Seiring dengan itu jumlah penganggur pun makin bertambah, sebagian di antaranya harus rela sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan meninggalkan Tanah Air untuk mencari rezeki di negeri orang (Sibuea, <http://www2.kompas.com/>)

Sektor pertanian sebenarnya memiliki ketersediaan lapangan pekerjaan yang besar. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada masa krisis hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan semua sektor ekonomi tumbuh pada kuartal ketiga 2007, dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan terbesar terjadi di sektor pertanian, yakni 10,2%. Pertumbuhan itu terutama dipasok produk agroindustri, yakni 33,7%. Bahkan tidak ada satu negara maju pun di dunia dimana pertaniannya tidak maju. Tingkat kecanggihan pertanian di negara maju misalnya, sama dengan tingkat kecanggihan sektor-sektor lainnya.

Sebagai landasan perekonomian suatu negara pertanian menjadi sumber pangan, sandang dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat. Selain itu pertanian melalui agroindustri merupakan sumber bahan baku bagi industri lainnya; dan sebagai pemasok tenaga kerja bagi sektor pabrikasi dan sektor jasa di perkotaan. Sejalan dengan peningkatan pendapatan penduduk, maka kebutuhan produk olahan hasil pertanian akan semakin meningkat.

Disamping menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar dari produk primernya, pengolahan hasil yang meningkat akan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk on-farm, baik jumlah, mutu dan nilai, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen.

Pengalaman masa krisis sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab kegagalan pengembangan industri adalah banyaknya komponen impor (*foot loose industries*). Selain itu tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang relatif lebih rendah dibanding dengan tingkat produktivitas tenaga kerja negara lain termasuk dengan negara *newly industrialized countries*. Rendahnya tingkat produktivitas antara lain disebabkan oleh kurangnya budaya industrial tenaga kerja yang pada umumnya berasal dari pedesaan (Deptan, 2005). Selain itu tumbuhnya industri manufaktur di perkotaan menyebabkan urbanisasi yang dapat menurunkan daya dukung, kualitas lingkungan dan persoalan sosial ekonomi di perkotaan. Oleh karena itu, strategi pengembangan industri kedepan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan industri perkotaan dan industri pedesaan.

Disamping akan mencegah derasnya arus urbanisasi yang menyebabkan berbagai masalah di perkotaan, strategi ini pun akan menjamin pemerataan dengan cepat dan seimbang ke seluruh wilayah tanah air. Industri yang pada umumnya berada di pedesaan atau di pinggiran perkotaan (*sub-urban*) adalah industri yang berbasis pertanian, yaitu industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Oleh karena itu, disamping manfaat diatas industri yang sebaiknya dikembangkan di pedesaan adalah industri yang berbasis pertanian. Alasannya adalah pertama bahwa bahan baku untuk industri ini tersedia melimpah di pedesaan, dan kedua, tenaga kerja di pedesaan tersedia melimpah sesuai dengan tingkat kemampuan yang dibutuhkan. Pada waktu yang sama, industri utama berkembang di perkotaan, industri pabrikan penunjang lainnya harus sudah mulai dikembangkan secara paralel di pedesaan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa agroindustri dapat menjadi salah satu alternatif meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran. Berbeda dengan industri lain, agroindustri tidak harus mengimpor sebagian besar bahan bakunya dari luar negeri tetapi tersedia banyak di dalam negeri. Dengan mengembangkan agroindustri secara tidak langsung telah membantu meningkatkan perekonomian petani sebagai penyedia bahan baku untuk industri.

Tulisan ini bertitik tolak dari asumsi bahwa kebijakan revitalisasi pertanian melalui agroindustri perdesaan melibatkan seluruh petani baik petani kecil, menengah maupun petani besar. Sementara itu agroindustri merupakan usaha yang memerlukan modal besar, namun di sisi lain petani kecil, sebagai mayoritas petani di Indonesia, memiliki kelemahan dalam menghadapi dan memilih usaha. Tulisan ini memandang sistem agroindustri dari sudut sosiologis agar dalam agroindustri tidak meninggalkan petani kecil dan mengikutsertakan sebagai subyek dalam agroindustri.

PETANI INDONESIA

Sebagian Besar petani di Indonesia tergolong petani gurem atau petani kecil. Menurut Soekartawi (2002), jumlah petani gurem di Indonesia mencapai 9.532 ribu atau 48,9 persen dari rumah tangga pertanian pada tahun 1983, 10.937 ribu atau 50,9 persen pada tahun 1993, dan pada tahun 2003 diperkirakan menjadi 12.058 ribu atau 51,3 persen. Karakteristik petani gurem secara ekonomi adalah petani yang memiliki pendapatan rendah, pengelolaan sederhana dan produk berorientasi pasar domestik. Disamping itu petani gurem memiliki sifat tidak mau mengambil risiko dan mendahulukan selamat (*safety first*) daripada berusaha memperoleh keuntungan yang besar. Bagi petani, pengalaman kegagalan dalam berproduksi merupakan suatu

yang sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Menurut Scott (1983), adanya perilaku enggan terhadap risiko di dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh dilema ekonomi sentral yang dihadapi oleh kebanyakan rumahtangga petani. Sifat khas pada diri petani adalah berusaha menghindari kegagalan dan bukannya berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil risiko.

Menurut Soemardjan (2002), karakteristik petani gurem secara sosial budaya adalah petani yang hidup di luar kota, berteknologi sederhana, berkebudayaan dengan fokus pada sistem sosial yang mengutamakan kekeluargaan, kerukunan, kedamaian dan harmoni antara manusia dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan alam. Petani lebih menggunakan budaya sosial daripada budaya ekonomi, berarti petani lebih mengunggulkan nilai-nilai sosial daripada nilai-nilai ekonomi. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang cenderung rendah. Data Sakernas (BPS, 2002) menunjukkan pada tahun 2000 tingkat pendidikan petani di Indonesia 40 persen hanya berpendidikan SD. Selain itu dalam perilaku ekonomi petani dipengaruhi oleh orientasi budaya yang tercermin dalam asas resiprositas sebagai akibat adanya persamaan nasib karena hidup dalam lingkungan yang sama, lingkungan yang memberi batasan dalam gerak penduduknya. Batasan-batasan gerak tersebut menyebabkan keterikatan masyarakat dengan tanah kelahiran atau *sedentary* dan terhadap kekerabatan menjadi sangat kuat.

Batas-batas budaya sosial ekonomi itu melemahkan petani berproduksi untuk pasar. Baru kalau produksi usahatannya melebihi keperluan rumahtangga, petani menjual surplus produksinya kepada pembeli umum. Oleh karena itu perubahan hendaknya diarahkan sedemikian rupa sehingga nilai-nilai dalam budaya sosial direformasi dengan sadar agar menjadi sesuai dengan nilai-nilai dalam ekonomi.

REVITALISASI PERTANIAN MELALUI AGROINDUSTRI PERDESAAN

Indonesia merupakan negara Agraris dengan potensi pertanian yang melimpah baik tanaman pangan, perkebunan, perikanan, tanaman industri, hortikultura maupun peternakan. Potensi tersebut selama ini masih belum digarap dengan baik, sehingga nilai tambah yang diperoleh masih kecil dan umumnya menguntungkan orang kota. Nilai tambah komoditi tersebut dapat ditingkatkan melalui industrialisasi di pedesaan dengan memanfaatkan teknologi dan kekuatan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia desa. Peningkatan nilai tambah ini dapat dilaksanakan melalui industrialisasi pedesaan berbasiskan pertanian, dan sektor pertanian dapat dikatakan sebagai sektor penyanggah ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian.

Untuk itu Departemen Pertanian melalui revitalisasi pertanian melakukan upaya yang terencana dan terarah untuk menciptakan industri pertanian yang mampu merubah nilai tambah hasil pertanian dan penerapan teknologi. Keberhasilan industri tergantung sejauh mana teknologi dapat diterapkan di lapangan terutama teknologi penanganan pascapanen dan teknologi pengolahan. Penerapan teknologi dalam penambahan nilai baik secara kualitatif (mutu) maupun kuantitatif sudah dimulai sejak awal tahun 1980 sampai sekarang. Upaya penerapan teknologi tersebut ditempuh melalui kegiatan: 1) Introduksi teknologi pengolahan di tingkat petani; 2) Gerakan penanganan pascapanen dan pengolahan ; 3) Demonstrasi dan kampanye teknologi pengolahan; 4) Latihan teknologi pengolahan bagi pelaku 5) Pembentukan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah, 6) pembentukan unit pelaksana lapangan, 7) bantuan peralatan pengolahan sebagai percontohan dan 8) melakukan kemitraan untuk membangun pemasaran.

Penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian saat ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan informasi tentang teknologi tersebut dan perhatian pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah selama ini masih relatif

kecil jika dibandingkan dengan upaya produksi hasil pertanian. Dampak yang terlihat antara lain masih tingginya tingkat kehilangan hasil pascapanen, mutu hasil olahan yang masih rendah, tingkat efisiensi dan efektifitas hasil yang masih rendah, nilai jual yang kurang kompetitif dan penampakan hasil (keragaan hasil) yang belum memuaskan (terutama masalah pengemasan, pewarnaan, pengawetan dan pelabelan).

Agar pengembangan agroindustri menjadi lebih akseleratif, terpadu dan berkelanjutan maka Departemen Pertanian membuat Gerakan Industrialisasi Pertanian di Pedesaan (GERINDA 2020) yang merupakan perwujudan terbentuknya agroindustri modern yang berkerakyatan dengan bertumpu pada *high technology*, SDM bermutu tinggi, usaha padat modal, unit bisnis tangguh dan kompatibilitas antar sub sistem agroindustri yang tinggi.

Prasyarat berkembangnya industrialisasi pedesaan, adalah diperlukan adanya suatu proses konsolidasi usahatani dan disertai dengan koordinasi vertikal agroindustri dalam suatu alur produk melalui mekanisme non pasar, sehingga karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan preferensi konsumen akhir. Dengan demikian, setiap usaha agroindustri tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam assosiasi horizontal, tetapi memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur produk vertikal (hulu-hilir) dalam suatu kelompok usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Aspek Kebijakan

Keberpihakan pada kegiatan yang terkait dalam industrialisasi pedesaan berbasis pertanian masih tertinggal, dibandingkan dengan kegiatan di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam pembangunan agroindustri (hulu-hilir), sehingga nilai tambah sektor pertanian dapat dinikmati oleh masyarakat di pedesaan.

2. Koordinasi Lintas Sektoral

Pengembangan penanganan industrialisasi pedesaan berbasis pertanian tidak dapat secara parsial, oleh karena itu pendekatan koordinasi antar kelembagaan terkait perlu ditingkatkan di pusat, daerah dan lembaga penyuluhan. Koordinasi dimaksudkan untuk mensinkronkan program dan pelaksanaan penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian agar dapat memberikan hasil/dampak yang maksimal.

3. Aspek Teknologi

Pengembangan agroindustri diarahkan untuk meningkatkan peran teknologi melalui penambahan jumlah alat mesin. Dalam penambahan alat mesin perlu memperhatikan jenis alat dan mesin yang secara teknis dan ekonomi layak dikembangkan serta kondisi sosial memungkinkan. Dalam pengembangan alat mesin tersebut pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas kredit dengan tingkat suku bunga rendah dan persyaratan lunak.

4. Aspek Kelembagaan

Dalam penanganan agroindustri perlu ditata dan diperkuat sebagai komponen dari sistem perekonomian di pedesaan terutama di bidang teknologi alat mesin dan manajemen usaha agar mereka mampu meraih nilai tambah

5. Aspek Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk peningkatan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan kewirausahaan, manajemen serta kemampuan perencanaan usaha. Dengan peningkatan mutu SDM diharapkan penggunaan alat mesin akan meningkat dan areal yang dapat ditangani akan bertambah. Peningkatan mutu SDM dilakukan melalui pelatihan/kursus, kerjasama dengan lembaga pelatihan dan magang di perusahaan yang maju. Pelatihan diberikan pada petugas, para pengelola alat mesin dan petani.

6. Aspek Permodalan

Kelembagaan yang menangani pascapanen/pengolahan pada umumnya lemah dalam permodalan. Untuk itu perlu diupayakan adanya skim khusus untuk alat mesin

pascapanen/pengolahan dengan persyaratan yang mudah, suku bunga rendah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN BIDANG AGROINDUSTRI

Seiring dengan perjalanan waktu muncullah paradigma baru pembangunan agroindustri, yaitu pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk petani dan buruhtani, melalui penyediaan fasilitas dan prasarana publik, pengembangan sistem agroindustri, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan IPTEK guna memanfaatkan potensi keunggulan sumberdaya alam (Soemarno, 2006). Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat perlu memperbaiki iklim ekonomi makro dan kegiatan ekonomi riil yang kondusif yang dapat menjamin kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih kompetitif dan menguntungkan.

Pembangunan bidang agroindustri perlu dirumuskan sejalan dengan paradigma baru dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas sumberdaya manusia sebagai pelaku aktif dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi maju yang murah, sederhana, dan efektif disertai penataan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan. Pembangunan agroindustri dengan paradigma baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor non-pertanian. Keterkaitan sektor pertanian dan non-pertanian akan semakin cepat terjadi bila tersedia prasarana ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan.

Pembangunan agroindustri patut mengedepankan potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya. Keunggulan komparatif yang berupa sumberdaya alam perlu diiringi dengan peningkatan keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui penciptaan sumberdaya manusia dan masyarakat agroindustri yang semakin profesional. Masyarakat tani, terutama masyarakat tani tertinggal sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat, perlu terus dibina dan didampingi sebagai manusia tani yang makin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Sumberdaya alam dan manusia menjadi dasar bagi pengembangan pertanian masa depan.

Perencanaan wilayah yang komprehensif untuk pengembangan dan pembangunan sektor strategis sangat diperlukan dalam pencapaian hasil pembangunan yang optimal di suatu wilayah. Perencanaan Pengembangan Kawasan Sentra Agroindustri (P-KSA) merupakan salah satu bentuk perencanaan wilayah untuk sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan nilai tambah yang diikuti peningkatan produksi pada sentra-sentra produksi dari sub sektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan dan subsektor peternakan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang relevan. Konsep kawasan dalam KSA dapat berdiri sendiri dan ataupun menyatu dalam satu Kawasan lebih luas (beberapa bagian wilayah kecamatan), tergantung dari potensi sentra produksi (fungsi kawasan) serta faktor jarak geografis dan aksesibilitas. Faktor jarak aksesibilitas sangat berperan di dalam menentukan orientasi suatu kawasan, terutama kawasan potensial yang jauh dari pusat pengembangan, sehingga penentuan kawasan sentra produksi tidak lagi dipengaruhi oleh batas administratif.

Oleh karena itu untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan di daerah, dipandang perlu adanya penyusunan rencana pengembangan Kawasan Sentra Produksi guna pengembangan komoditas unggulan/utama, yaitu subsektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan subsektor peternakan yang dibentuk dalam suatu kawasan sebagai Sentra Pengembangan Produksi mulai dari berskala kecil (mikro) hingga berskala besar (makro) dan ekonomis. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, serta pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

Penentuan Kawasan Sentra Agroindustri di suatu daerah, diarahkan pada wilayah-wilayah kabupaten / kecamatan yang memiliki potensi pengembangan agroindustri dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan serta harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah itu termasuk pasar. Lingkup kawasan tidak dibatasi dengan batas administratif, tetapi ditentukan oleh fungsinya. Dengan demikian, maka lingkup kawasan dapat relatif luas dapat terdiri dari bagian-bagian wilayah kecamatan, bisa juga relatif kecil dapat terdiri dari satu atau lebih dari dua bagian wilayah kecamatan dan atau antar kabupaten / kota.

Dalam kaitannya antara batas administratif dengan faktor jarak geografis terhadap kemungkinan terbentuknya kawasan, ada kemungkinan ditemukannya pemisahan dari suatu wilayah kabupaten dan masuk membentuk kawasan baru di suatu wilayah kabupaten lain. Kemungkinan ini dapat saja terjadi di seluruh wilayah kabupaten dan kota, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan langsung secara fisik.

PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI : KOMUNITAS SEBAGAI LANGKAH AWAL

Revitalisasi pertanian melalui pengembangan agroindustri di perdesaan merupakan pilihan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan. Hal ini, memungkinkan karena adanya kemampuan yang tinggi dari agroindustri dalam penyerapan tenaga kerja, mengingat sifat industri pertanian yang padat karya dan bersifat massal. Industri pertanian yang berbasis pada masyarakat tingkat menengah dan bawah ini merupakan sektor yang sesuai untuk menampung banyak tenaga kerja dan menjamin perluasan berusaha sehingga akan efektif dalam upaya meningkatkan perekonomian di perdesaan. Mengingat aktivitas pertanian sebagai pilar utama pembangunan di pedesaan, maka sangat rasional jika menempatkan industrialisasi pedesaan sebagai upaya dalam merevitalisasi pertanian melalui paradigma baru.

Arah pembangunan bidang agroindustri menurut paradigma baru dapat diwujudkan melalui upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat agroindustri dilakukan sesuai dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhan. Sejalan dengan arah pembangunan pertanian, peran pemerintah adalah mempertajam program pembangunan untuk masyarakat melalui penguatan kelembagaan pembangunan, baik kelembagaan masyarakat tani maupun kelembagaan birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui pembangunan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, dan berkembangnya kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meskipun demikian tantangan utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat agroindustri adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang lebih layak.

Namun konsepsi pengembangan agroindustri berparadigma baru tersebut menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan nasib mayoritas petani (51,3%) di Indonesia tergolong petani gurem atau petani kecil. Dalam konteks pengembangan agroindustri tersebut sebagian besar petani berada pada aktivitas pertanian primer. Petani tersebut umumnya adalah petani subsisten dan hanya sedikit yang menjadi petani komersial, serta sangat sedikit yang dapat berkembang menjadi 'konglomerat kecil' di bidang pertanian. Petani kurang memiliki akses terhadap kegiatan agroindustri hulu dan hilir yang umumnya dikuasai pengusaha besar, sehingga petani kurang memiliki akses terhadap nilai tambah komoditas agroindustri yang diciptakan di hulu dan hilir.

Oleh karena itu pengembangan agroindustri di perdesaan hendaknya diarahkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di perdesaan. Agroindustri yang sejatinya merupakan industri di bidang pertanian diharapkan mampu menjembatani kondisi sosial ekonomi petani

dengan industri yang diharapkan, sehingga akan meningkatkan tingkat perekonomian petani. Dengan berkembangnya industri pedesaan terutama industri pengolahan hasil pertanian diharapkan dapat menyerap hasil-hasil pertanian di pedesaan. Untuk mengembangkan industri pedesaan tidaklah mudah karena adanya berbagai kendala. Kendala utama yang sering dihadapi industri pedesaan selain permodalan dan pasar adalah teknologi. Teknologi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengolahan hasil pertanian. Dengan teknologi, maka proses pengolahan hasil pertanian dapat dilakukan secara efisien. Selama ini telah tersedia berbagai teknologi pengolahan hasil pertanian, namun demikian penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian tersebut masih kurang intensif terutama pada industri skala kecil/rumah tangga di Pedesaan.

Sehubungan dengan itu nampaknya petani kita belum mampu melangkah mengikuti tahap dalam pengembangan agroindustri tersebut. Hal ini terjadi karena untuk melangkah ke tahap industrialisasi pedesaan petani harus menyediakan modal investasi yang besar. Dengan demikian proses pengembangan agroindustri tersebut merupakan penyaringan yang cenderung meloloskan minoritas elit pemilik modal besar, dan perlu diingat pola *trickle down effect* yang selama ini diterapkan tidak berjalan sama sekali, jangankan menetes ber-embun-pun tidak.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu didorong munculnya petani yang memiliki modal cukup dengan melakukan perikatan antar petani dalam konteks sosio-industri tertentu, sehingga petani menjadi subyek dalam agroindustri, artinya perlu mempertimbangkan struktur social petani dalam industri pedesaan. Bentuk perikatan yang dimaksud adalah menjadikan petani dalam suatu sistem yang terpadu dan terkoordinir oleh suatu perusahaan agroindustri dalam skala besar, baik BUMN maupun swasta, sehingga petani dan perusahaan agroindustri dalam skala besar tersebut sebagai '*satu komunitas agroindustri*', dimana terganggunya salah satu komunitas akan mengganggu komunitas lain. Dalam hal ini perusahaan membuka peluang berusaha bagi petani kecil dan bukan semata-mata membuka peluang kerja.

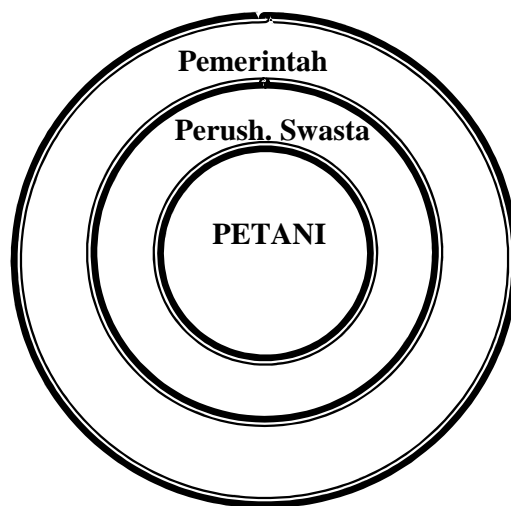
Pendekatan komunitas agroindustri melibatkan petani sebagai salah satu asupan dalam agroindustri. Berdasarkan karakteristik sebagian besar petani yang subsisten maka perlu ditempuh usaha-usaha terpadu secara bertahap dengan mempertimbangkan sosial budaya masyarakat setempat, sehingga dapat ditempuh dua macam cara:

1. Bagi petani yang memiliki modal cukup untuk suatu usaha agroindustri perlu didorong untuk suatu usaha agroindustri mandiri secara koperatif dalam skala kecil. Dengan pola ini setiap rumahtangga tani yang menguasai memiliki modal akan mengelola suatu unit agroindustri skala kecil. Pengelolaan kegiatan agroindustri secara lokalitas tetapi terkonsolidasi dalam satu wadah yang bersifat koperatif untuk konsolidasi manajemen agroindustri.
2. Bagi petani yang tidak memiliki modal cukup untuk suatu usaha agroindustri perlu didorong untuk suatu usaha sebagai mitra dalam agroindustri skala besar.
 - a. Perusahaan besar BUMN atau swasta perlu membuat suatu demonstrasi area pada suatu daerah yang memungkinkan untuk suatu usaha agroindustri. Lahan yang digunakan adalah lahan milik petani tertentu yang memiliki pengaruh kuat secara sosial dalam masyarakat dengan harapan akan diikuti oleh petani secara luas.
 - b. Tahap berikutnya adalah dengan menyewa lahan milik petani yang berdekatan dengan lokasi demonstrasi area, petani pemilik lahan sebagai tenaga kerja dengan mendapat upah. Pada tahap ini secara tidak langsung petani akan mendapat bimbingan dan penyuluhan dalam agroindustri yang mantap.
 - c. Pada proses penanganan pasca panen dan pemasaran dilakukan oleh agroindustri skala besar dengan mengikut sertakan petani. Hal ini dilakukan karena pada tahap industri pengolahan hasil pertanian primer dan perdagangan yang dapat dilakukan secara efektif dalam skala besar. Selain itu untuk mendapatkan harga yang baik diperlukan *bargainning position* yang kuat dan agroindustri dalam skala besar yang memilikinya.

- d. Petani yang menjadi mitra agroindustri skala besar akan memiliki akses ke lembaga keuangan, transportasi, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain berada pada sub sistem lembaga jasa.

Mengingat kondisi petani di Indonesia yang sebagian petani gurem, maka perlu dipikirkan suatu bentuk agroindustri yang mengikutsertakan petani sebagai bagian dari agroindustri. Hal ini perlu, karena dalam pembangunan pertanian pada dasarnya ada 2 (dua) pilar yang merupakan subyek pembangunan pertanian yaitu pelaku agroindustri (sebagai pelaku ekonomi modern) dan petani (sebagai pelaku ekonomi tradisional). Pelaku agroindustri memiliki modal ekonomi dan kaum tani memiliki modal sosial. Modal ekonomi meliputi kemampuan manajemen agroindustri modern, teknologi, dan kemampuan finansial. Sedangkan modal sosial yang dimiliki kaum tani yaitu institusi-institusi hubungan produksi pertanian yang bersifat informal-rasional. Modal alami berupa modal lahan sebagian besar dimiliki oleh kaum tani dengan rerata penguasaan lahan yang sempit dan sebagian kecil dimiliki oleh pelaku agroindustri dengan rerata penguasaan lahan yang luas. Pemerintah berperan sebagai pelindung dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang memihak, seperti izin ekspor, karantina, izin penangkaran dan penciptaan iklim yang kondusif.

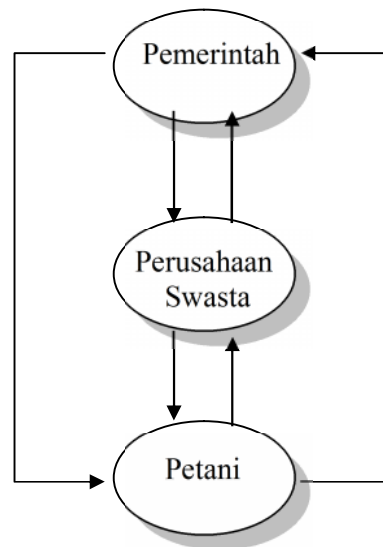
Salah satu strategi yang mungkin dilakukan untuk mendekatkan antar subyek revitalisasi pertanian, termasuk dengan pemerintah adalah dengan menjadikannya ketiganya sebagai satu komunitas. Dengan kata lain petani, pelaku agroindustri dan pemerintah merupakan satu bagian '**Komunitas Agroindustri**', seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Komunitas Agroindustri di Perdesaan

Dalam konsep komunitas agroindustri perdesaan tersebut terdapat keterkaitan sebagai mitra antara petani, sebagai inti dari komunitas mengingat jumlahnya yang begitu besar, swasta pelaku agroindustri dan pemerintah. Pelaku agroindustri yang sebenarnya dalam konsep komunitas ini pada hakekatnya adalah semua anggota komunitas. Untuk keperluan tersebut maka perlu dilakukan penyatuan antara anggota komunitas dalam suatu Aliansi Strategis Komplementer, yaitu antara Pemerintah, swasta, dan petani. Hal ini disebabkan bahwa aliansi dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluang pasar dengan mengkombinasikan berbagai macam sumber-sumber dari perusahaan dan para pelaku ekonomi yang menjadi mitra dengan cara saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Persyaratan keberhasilan aliansi sangat tergantung pada perpaduan efektif dan partisipasi serta pencapaian komitmen penuh setiap pihak yang bermitra. Manfaat dan hasil dari aliansi tersebut harus menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya.

Peran Pemerintah, swasta, dan petani sebagai bagian dari aliansi haruslah sesuai kemampuan masing-masing. Untuk itu model Aliansi Strategis Komplementer yang lebih pas adalah Aliansi Strategis Komplementer vertikal. Hal ini karena Aliansi Strategis Komplementer vertikal dibentuk oleh perusahaan dan para pelaku ekonomi yang setuju untuk menggunakan keahlian dan kapabilitasnya dalam tahap-tahap yang berbeda untuk mencapai nilai yang baru. Aliansi yang terjadi lebih difokuskan pada kemampuan untuk menciptakan produk berkualitas, seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Aliansi Strategis Komplementer vertikal

Untuk keperluan tersebut maka perlu dilakukan usaha pemberdayaan terutama di tingkat petani sebagai inti dari komunitas pembangunan pertanian nasional. Pemberdayaan petani dibangun melalui program yang menghargai adanya kebebasan berpendapat guna memotivasi petani agar mampu mengelola usahatannya secara optimal. Kaum tani maupun pelaku agroindustri tidak dapat berdiri sendiri untuk menghadapi era globalisasi mengingat kondisi kaum tani di Indonesia dimana tingkat kesejahteraannya dan pendidikan yang relatif rendah. Untuk itu perlu dicari bentuk kerjasama antara petani, pelaku agroindustri dan pemerintah dimana masing-masing subyek pembangunan dengan modal yang mereka miliki akan memperoleh win-win solution dan mampu menghadapi ketatnya persaingan di dunia bisnis secara bersama-sama.

Dalam pemberdayaan ini petani akan merasa terlibat secara personal dan merasa memperoleh pengakuan atas eksistensi dirinya yang berdampak pada peningkatan harga diri sebagai manusia. Penerapan pemberdayaan akan menimbulkan rasa percaya diri dan mereka akan bekerja secara efektif dan efisien, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan meningkat seiring dengan pembangunan agroindustri di perdesaan.

PENUTUP

Pembentukan ‘**Komunitas agroindustri**’ yang mengikutsertakan petani sebagai bagian dari komunitas tersebut tidak lepas dari kebiasaan dan sikap sebagian besar petani di Indonesia. Kebiasaan dan sikap petani yang cenderung memusatkan pada satu usaha tertentu secara turun-temurun dan tidak berorientasi ke pasar global. Disamping itu kurang realistis bila akan mentransformasikan secara cepat sistem pertanian tradisional (subsisten) yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Melalui pembentukan komunitas agroindustri di perdesaan petani diajak untuk mengubah pandangannya dengan menjadi bagian dari agroindustri untuk dapat bersaing dalam pasaran global.

Untuk itu diperlukan suatu kerjasama antar pelaku agroindustri di Indonesia, yaitu Pemerintah, perusahaan swasta dan petani dalam suatu **Aliansi Strategis Komplementer vertikal**. Dengan ini diharapkan akan bersatu modal ekonomi dan modal sosial secara sinergi bagi perkembangan pembangunan pertanian Indonesia. Dengan harapan tingkat kesejahteraan petani akan meningkat seiring dengan pembangunan agroindustri di perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 2002. *Statistik Indonesia 2001*. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 2008. *Statistik Indonesia 2007*. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Departemen pertanian, Direktorat Jendral Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian. *Revitalisasi Pertanian Melalui Agroindustri Perdesaan*. <http://deptan.co.id>. (15 Februari 2009)
- Sibuea, Posman. *Agroindustri, Bisnis Unggulan yang Menampik Kemiskinan*. <http://www2.kompas.com/>. (2 Maret 2009)
- Scott, JC. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. LP3ES. Jakarta.
- Soekartawi. 2002. Petani Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global. Prosiding Lokakarya Nasional 2002. *Masalah Kesiapan Indonesia Menghadapi pemberlakuan AFTA 2003: Suatu Tinjauan terhadap peluang dan Tantangan Sumberdaya Manusia Indonesia Khususnya di Bidang Pertanian*. faperta UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Soemarno, *Pengembangan Industri-Agrobisnis yang mempunyai Potensi di Jawa Timur*. <http://images.soemarno.multiply.com>. (20 Februari 2009).
- Soemardjan, Selo. 2002. Hubungan Budaya Sosial dan Budaya Ekonomi. Prosiding Lokakarya Nasional 2002. *Masalah Kesiapan Indonesia Menghadapi pemberlakuan AFTA 2003: Suatu Tinjauan terhadap peluang dan Tantangan Sumberdaya Manusia Indonesia Khususnya di Bidang Pertanian*. Faperta UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Yudohusodo, Siswono. 2002. Revitalisasi Kelembagaan dan SDM Pertanian dalam menghadapi Pemberlakuan Kebijakan AFTA 2003. Prosiding Lokakarya Nasional 2002. *Masalah Kesiapan Indonesia Menghadapi pemberlakuan AFTA 2003: Suatu Tinjauan terhadap peluang dan Tantangan Sumberdaya Manusia Indonesia Khususnya di Bidang Pertanian*. Faperta UPN “Veteran” Yogyakarta.
- _____. 2003. PEMBERDAYAAN Ekonomi Petani Melalui LEISA. Makalah Seminar Nasional *Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Petani Melalui Penerapan Konsep LEISA*. 2003. Faperta Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.